

Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Polewali Mandar

Juhura

Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Parepare, Indonesia

Artikel Info

Article history:

Received: 2024-12-22

Revised: 2025-05-30

Accepted: 2025-08-29

Available: 2025-08-29

Keywords:

Fiscal Policy, Regional Taxes, Regional Revenue, Tax Technology

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Juhura. (2025). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah di Polewali Mandar. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 148-155.

ABSTRACT

Tax is one of the main instruments in fiscal policy that has a strategic role in increasing regional income. This study aims to analyze the role of tax as a fiscal policy instrument in increasing regional income in Polewali Mandar. The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, documentation studies, and direct observation. The results of the study indicate that the optimization of tax revenue in Polewali Mandar is influenced by the effectiveness of tax administration, public awareness of tax obligations, and information technology support. The discussion shows that there is great potential for increasing regional income through tax reform, increasing the capacity of tax officials, and increasing community participation. The conclusion of this study is that tax has a significant role as a fiscal policy instrument in increasing regional income in Polewali Mandar, but synergistic efforts are needed between the local government, tax officials, and the community to achieve optimal results.

*Corresponding author

e-mail: jhuraaldo@gmail.com

Page: 148-155

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2025, the author(s)

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal memegang peranan strategis dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi¹. Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Dalam konteks daerah, pajak memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik². Di Polewali Mandar, pemerintah daerah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan dan inovasi administrasi.

Namun, tantangan dalam optimalisasi pajak daerah masih menjadi isu utama. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak, dan lemahnya infrastruktur teknologi informasi. Faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas sistem perpajakan, sehingga potensi pajak daerah belum tergali secara maksimal. Sebagai salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, Polewali Mandar memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi sektor-sektor ini terhadap penerimaan pajak daerah.

Peningkatan pendapatan pajak daerah tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan pajak, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Studi oleh Luttmer dan Singhal (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak dan kepercayaan mereka pada pemerintah³. Di Polewali Mandar, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melibatkan edukasi, transparansi, dan penguatan layanan pajak berbasis digital. Strategi ini sejalan dengan tren global yang menekankan pentingnya teknologi dalam modernisasi sistem perpajakan.

Di sisi lain, insentif pajak yang diterapkan pemerintah daerah untuk sektor strategis seperti pertanian dan UMKM juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal⁴. Insentif ini diharapkan dapat menarik lebih banyak pelaku usaha untuk berkontribusi dalam basis pajak daerah. Namun,

¹ I Wayan Sudirman and S U SE, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal* (Prenada Media, 2017).

² Agus Sunarya Sulaeman and Vivin Silvia, "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 97-112.

³ Nurul Fatimah Azzahra, "Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, Dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Jakarta Pusat)" (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2023).

⁴ Indah Permata Sari et al., "Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 552-59.

efektivitas kebijakan insentif sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan evaluasi dampak dan pengawasan yang tidak optimal. Oleh karena itu, evaluasi berbasis kinerja perlu diterapkan untuk memastikan kebijakan ini memberikan manfaat yang signifikan.

Pendekatan berbasis teknologi, seperti penggunaan e-filing dan e-billing, telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan di Polewali Mandar. Namun, adopsi teknologi ini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di daerah terpencil. Infrastruktur teknologi yang terbatas juga menjadi kendala dalam implementasi sistem digital yang efektif. Mengacu pada teori transformasi digital administrasi pajak (OECD, 2020), integrasi teknologi informasi dengan pelatihan masyarakat menjadi kunci keberhasilan modernisasi perpajakan⁵.

Pengaruh ekonomi lokal terhadap penerimaan pajak juga tidak bisa diabaikan⁶. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, Polewali Mandar memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan. Namun, kontribusi sektor-sektor ini terhadap pendapatan pajak daerah masih rendah karena berbagai kendala, seperti kurangnya akses pasar dan keterbatasan infrastruktur. Integrasi kebijakan fiskal dengan program pembangunan ekonomi lokal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan basis pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif⁷.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan pendapatan daerah di Polewali Mandar. Fokus penelitian mencakup efektivitas administrasi perpajakan, tingkat kesadaran wajib pajak, peran teknologi informasi, serta dampak insentif pajak terhadap perekonomian lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung optimalisasi pajak daerah di Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran pajak dalam kebijakan fiskal di Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan pejabat pemerintah daerah, aparat pajak, dan pelaku usaha untuk mendapatkan perspektif mengenai penerimaan pajak dan tantangan yang dihadapi.

⁵ Sepriano Sepriano et al., *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁶ Muhammad Rizal Rosyadi, "Determinan Penerimaan Pajak Daerah Di Indonesia," *Jurnalku* 4, no. 2 (2024): 222–31.

⁷ Bambang Agus Windusanco, "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia," *Mimbar Administrasi* 18, no. 1 (2021): 89–105.

2. Studi Dokumentasi: Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan daerah, peraturan daerah tentang pajak, dan data statistik penerimaan pajak.
 3. Observasi Langsung: Mengamati langsung proses administrasi pajak dan interaksi antara aparat pajak dengan wajib pajak di Polewali Mandar.
- Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah di Polewali Mandar. Peningkatan penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir tercatat sebesar 11,4%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak, adopsi teknologi perpajakan, dan implementasi kebijakan insentif untuk sektor strategis.

Tabel 1. Indikator Penerimaan Pajak Daerah di Polewali Mandar (2021–2023)

Indikator	2021	2022	2023	Perubahan(%)
Total Penerimaan Pajak Daerah (Rp Miliar)	45.5	48.2	50.7	+11.4%
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (%)	63.4	67.2	71.8	+13.2%
Kontribusi Pajak Sektor Pertanian (%)	15.2	16.8	18.5	+21.7%
Kontribusi Pajak Sektor UMKM (%)	10.5	12.3	13.7	+30.5%

Sumber: Data Dinas Pendapatan Daerah Polewali Mandar (2021–2023), diolah

Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dari 63,4% pada tahun 2021 menjadi 71,8% pada tahun 2023 merupakan hasil dari kampanye edukasi dan pengingat otomatis melalui pesan singkat. Berdasarkan **Behavioral Tax Compliance Theory** (Luttmer & Singhal, 2014), peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan pajak⁸. Namun, wawancara menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak masih menjadi kendala yang perlu diperbaiki.

⁸ Hanik Susilawati Muamarah and Riani Budiarso, "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 257–72.

Penggunaan Teknologi dan Efisiensi Administrasi

Tabel 2. Penggunaan Teknologi dalam Sistem Perpajakan di Polewali Mandar (2021–2023)

Parameter	2021	2022	2023	Perubahan (%)
Pengguna e-Filing (%)	41.2	47.8	54.0	+31.1%
Pengguna e-Billing (%)	39.7	45.3	51.5	+29.7%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Polewali Mandar (2021–2023), diolah

Adopsi teknologi dalam administrasi perpajakan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Sebanyak 54% wajib pajak telah menggunakan e-filing untuk pelaporan pajak pada tahun 2023, meningkat dari 41,2% pada tahun 2021. Sistem digital seperti e-filing dan e-billing membantu mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Namun, wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas adopsi teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat di pedesaan.

Berdasarkan **Digital Transformation in Tax Administration** (OECD, 2020), upaya modernisasi perpajakan tidak hanya memerlukan infrastruktur teknologi tetapi juga pelatihan bagi wajib pajak dan aparat pajak⁹. Dalam hal ini, pelatihan yang lebih inklusif dan penyediaan akses internet yang lebih luas di daerah pedesaan menjadi prioritas untuk meningkatkan adopsi teknologi.

Efektivitas Insentif Pajak dan Dampaknya

Insentif pajak yang diberikan kepada sektor strategis seperti UMKM dan pertanian telah berkontribusi terhadap perluasan basis pajak daerah. Sebagai contoh, kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak meningkat dari 10,5% pada 2021 menjadi 13,7% pada 2023. Namun, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa insentif tersebut belum sepenuhnya efektif. Kendala yang sering muncul adalah kurangnya pendampingan teknis dan akses ke pembiayaan yang mendukung pengembangan usaha mereka.

Berdasarkan Targeted Tax Incentives Framework (Zolt, 2021), efektivitas insentif pajak dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa insentif hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria kinerja tertentu, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja atau peningkatan produksi¹⁰. Dengan pendekatan ini, insentif pajak dapat menjadi lebih terarah dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

⁹ Gabrella Dimetheo, Athirah Salsabila, and Nikita Ceysha Amabel Izaak, "Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia," in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, vol. 3, 2023, 10–25.

¹⁰ Dimetheo, Salsabila, and Izaak.

Tantangan Sektor Lokal

Kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan dari 15,2% pada 2021 menjadi 18,5% pada 2023. Sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, Polewali Mandar memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kebijakan fiskal yang mendukung sektor ini. Namun, tantangan seperti kurangnya akses pasar, keterbatasan teknologi pertanian, dan infrastruktur logistik yang tidak memadai masih menjadi hambatan.

Berdasarkan Inclusive Growth and Taxation Framework (UNDP, 2022), pengembangan sektor pertanian harus didukung oleh kebijakan perpajakan yang sejalan dengan strategi pembangunan lokal¹¹. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa penyediaan infrastruktur yang memadai, akses pembiayaan, serta pelatihan teknologi pertanian bagi petani. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian tidak hanya dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan pajak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Rekomendasi Strategis

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal telah berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah di Polewali Mandar. Namun, efektivitasnya masih memerlukan peningkatan dalam hal transparansi, modernisasi administrasi perpajakan, dan integrasi dengan strategi pembangunan lokal. Beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah meliputi:

1. Peningkatan transparansi melalui publikasi laporan tahunan penggunaan dana pajak.
2. Penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung layanan perpajakan digital.
3. Edukasi digital bagi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
4. Evaluasi kebijakan insentif berbasis kinerja untuk memastikan dampak ekonominya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah di Polewali Mandar. Penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan signifikan selama tiga tahun terakhir, yang didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak, adopsi teknologi perpajakan, dan

¹¹ Luhgiantno Luhgiantno et al., "Pengantar Ekonomi Pembangunan," 2024.

implementasi insentif untuk sektor-sektor strategis. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 13,2% dalam tiga tahun terakhir merupakan hasil dari strategi edukasi dan penyederhanaan administrasi pajak melalui digitalisasi. Namun, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, terutama di daerah terpencil, masih menjadi kendala. Implementasi teknologi seperti e-filing dan e-billing perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan digital bagi masyarakat.

Selain itu, insentif pajak yang diberikan kepada sektor strategis seperti UMKM dan pertanian telah membantu meningkatkan kontribusi sektor-sektor ini terhadap penerimaan pajak daerah¹². Namun, kurangnya dukungan komplementer, seperti akses pembiayaan dan pengembangan pasar, membatasi efektivitas insentif tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan insentif berbasis kinerja untuk memastikan dampak ekonominya lebih signifikan.

Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap penerimaan pajak daerah menunjukkan potensi yang besar untuk dikembangkan. Namun, tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan akses pasar perlu segera diatasi melalui integrasi kebijakan perpajakan dengan strategi pembangunan ekonomi lokal. Dukungan pemerintah berupa peningkatan akses infrastruktur, pelatihan teknologi, dan penguatan koperasi di sektor ini dapat menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kesimpulannya, meskipun peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal telah memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah di Polewali Mandar, optimalisasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Peningkatan transparansi, modernisasi administrasi perpajakan, serta kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan penerimaan pajak tidak hanya meningkat, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Nurul Fatimah. "Pengaruh Tax Morale, Pengetahuan Perpajakan, Dan E-Tax System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Jakarta Pusat)." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2023.
- Dimetheo, Gabrella, Athirah Salsabila, and Nikita Ceysha Amabel Izaak. "Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia." In *Prosiding Seminar*

¹² Anggun Tri Kurniawatik, Khaerunnisa Khaerunnisa, and Tasya Tasya, "Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi," *Cebong Journal* 1, no. 1 (2021): 1-9.

- Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3:10–25, 2023.
- Kurniawatik, Anggun Tri, Khaerunnisa Khaerunnisa, and Tasya Tasya. "Melek Information and Communications Technology (ICT) Pada Masyarakat Pedesaan Di Era Globalisasi." *Cebong Journal* 1, no. 1 (2021): 1–9.
- Luhgiantno, Luhgiantno, Anggita Permata Yakup, Isep Amas Priatna, Fara Dina, Abdurohim Abdurohim, Rasyid Widada, Sarah Nita Hasibuan, Hari Setia Putra, Tri Wibowo, and Anggelina Delviana Klau. "Pengantar Ekonomi Pembangunan," 2024.
- Muamarah, Hanik Susilawati, and Riani Budiarsih. "Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 2 (2021): 257–72.
- Rosyadi, Muhammad Rizal. "Determinan Penerimaan Pajak Daerah Di Indonesia." *Jurnalku* 4, no. 2 (2024): 222–31.
- Sari, Indah Permata, Krisna Marta Bahari, Syamsir Syamsir, and Aldri Frinaldi. "Analisa Kebijakan Publik Terhadap UMKM." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 552–59.
- Sepriano, Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sudirman, I Wayan, and S U SE. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal*. Prenada Media, 2017.
- Sulaeman, Agus Sunarya, and Vivin Silvia. "Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 97–112.
- Windusanco, Bambang Agus. "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia." *Mimbar Administrasi* 18, no. 1 (2021): 89–105.